

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru dengan menerapkan zona atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dijadikan poin utama dalam penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru (ppdb) dengan menerapkan zona atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dijadikan poin utama dalam penerimaan peserta didik baru.

Kebijakan system zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb) ini sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2017. Dalam praktiknya, pada tahun 2017 belum seluruhnya sekolah menerapkan system zonasi dikarenakan masih tahap adaptasi.

Sistem zonasi yang diberlakukan pada tahun 2020 memiliki sejumlah perbedaan dengan system zonasi ppdb 2019. Perbedaan tersebut mencakup jumlah kuota dari jalur zonasi. Pada tahun 2019, kuota siswa untuk jalur zonasi sebesar 80 persen dari 100 persen. Tahun 2020, kuota jalur zonasi berkurang menjadi 50 persen.

Berkurangnya kuota untuk jalur zonasi ppdb 2020 dipengaruhi pemerataan wilayah yang belum bisa mengikuti ppdb online. Oleh karena itu, menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) mengeluarkan kebijakan baru. Dampak dari pengurangan kuota untuk sistem zonasi berimbas pada jalur lainnya. Pada tahun 2020, kuota jalur prestasi meningkat dari 15 persen menjadi 30 persen. Orang tua pun dapat mendorong sang anak untuk mendapatkan nilai terbaik agar diterima di sekolah impian.

Tujuan diterapkan system zonasi antara lain untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan deskriminasi di sekolah dengan adanya anggapan sekolah unggulan dan bukan sekolah unggulan. Zonasi atau rayonisasi atau pembagian berdasarkan wilayah sering dilakukan dalam beberapa bidang atas tujuan tertentu dan memperoleh manfaat tertentu. Adapun tujuan zonasi secara umum adalah:

- 1) Meningkatkan Kualitas : Dengan menggunakan zonasi, hasil pekerjaan bisa lebih berkualitas sesuai potensi kawasannya.
- 2) Pemerataan : Ada kalanya zonasi dilakukan bertujuan sebagai pemerataan seperti misalnya zonasi pada sistem PPDB agar pendidikan menjadi merata.
- 3) Memudahkan Pengelolaan zonasi atau rayonisasi dibuat agar memudahkan pengelolaannya menjadi lebih tepat dan efisien.

Penerimaan kebijakan system zonasi dalam ppdb menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro merasa sepakat dengan kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah karena penerapan system zonasi ini merupakan kebijakan pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat untuk pemerataan mutu pendidikan.

Peneliti mengadakan pra survei selama 1 minggu di mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 23 Januari 2021 di SMP Negeri 6 Metro di dapat hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Pra Survey Sitem Zonasi Peserta Didik di SMP Negeri 6 Metro

NO	Sistem zonosi	Penerimaan dalam persen %	Realita
1.	Jalur Zonasi	50%	70%
2.	Jalur Afirmasi	15%	15%
3.	Jalur perpindahan orang tua	5%	5%
4.	Jalur Prestasi	30%	10%
Jumlah		100%	100%

Sumber Data : Hasil Rekap PPDB SMP Negeri 6 Metro Tahun 2020

Adanya kesenjangan pada jalur zonasi yang di harapkan pada sekolah 70% namun hanya terpenuhi 50% pada jalur afirmasi dan perpindahan orang tua orang tua tidak terdapat kesenjangan, namun pada jalur prestasi mengalami peningkatan kesenjangan dari yang di harapkan.

Dari uraian atas peneliti menemukan masalah dari berbagai pihak penerapan kebijakan sistem zonasi perspektif stakeholder sekolah.

Penerapan PPDB sistem zonasi di bahas masalah seberapa jauh tentang implementasi kebijakan system zonasi perspektif stakeholder sekolah, di SMP Negeri 6 Metro

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis mengambil fokus penelitian analisis implementasi kebijakan sistem zonasi perspektif stakeholder sekolah SMP Negeri 6 Metro. Maka uraian fokus penelitian dijelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut:

### **Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana implementasi sistem zonasi di SMP Negeri 6 Metro di Kota Metro?
2. Bagaimana pandangan stakeholder terhadap implementasi sistem zonasi di SMP Negeri 6 Metro di Kota Metro?
3. Bagaimana hasil analisis implementasi sistem zonasi terhadap stakeholder eksternal SMP Negeri 6 Metro di Kota Metro?

### **Tujuan Penelitian**

Setelah di tetapkan rumusan masalah di atas, berikut di tetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Implementasi Sistem Zonasi di SMP Negeri 6 Metro di Kota Metro.
2. Mendeskripsikan pandangan stakeholder terhadap Implementasi Sistem Zonasi di SMP Negeri 6 Metro di Kota Metro.
3. Mendeskripsikan hasil dari Implementasi Sistem Zonasi terhadap stakeholder eksternal sekolah di SMP Negeri 6 Metro di Kota Metro.

## **C. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan yang di dapatkan dari penelitian ini di harapkan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
  - Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai system zonasi yang telah diterapka oleh pemerintah.
2. Bagi masyarakat
  - a. Memberikan informasi baru kepada masyarakat mengenai system zonasi.
  - b. Memberikan suatu wacana kepada masyarakat bahwa semua sekolah yang ada di Kota Metro memiliki peluang yang sama.
  - c.

### 3. Bagi Sekolah

- a. Sekolah mendapatkan pemerataan dalam penerimaan peserta didik baru.
- b. Dengan adanya sistem zonasi pihak sekolah perlu meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

## D. KAJIAN LITERATUR

### 1. Perspektif Stakeholder Sekolah

Perkataan stakeholder pada awalnya digunakan dalam dunia usaha, istilah ini berasal dari bahasa Inggris terdiri atas dua kata ; *stake* dan *holder*. *Stake* berarti *to give support to* / pancang , *holder* berarti pemegang. Jadi stakeholder adalah siapapun yang memiliki kepentingan dari sebuah usaha.

Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karakteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan.

Kelembagaan yang dianjurkan dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, menurut UU No 20 Tahun 2003, pasal 56 adalah berupa Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah. Ketua dan anggota kedua lembaga tersebut dapat digolongkan sebagai Stakeholder.

Stakeholder dalam dunia pendidikan adalah mengupayakan orang-orang yang terdampak oleh aktivitas dan kebijakan pendidikan mendapat kebaikan atau manfaat. Stakeholder pendidikan digolongkan menjadi stakeholder internal dan eksternal. Pemangku kepentingan (stakeholder) internal pendidikan terdiri dari Guru, Siswa, Orang Tua, Staf administrasi sekolah. Pemangku kepentingan (stakeholder) eksternal pendidikan diantaranya kelompok atau organisasi di luar sekolah seperti Pemerintah, lembaga sosial di daerah, komunitas, lembaga kursus dan pelatihan. Pemangku kepentingan diharapkan bisa mendapatkan data pendidikan dan menggunakannya untuk memberikan dukungan atau koreksi pada proses pembelajaran. Misalnya, para guru bisa melihat kebijakan pendidikan dan menggunakannya untuk meningkatkan metode pembelajaran. Orang tua bisa membantu memfasilitasi para siswa untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dibutuhkan data yang

valid, lengkap, cepat dan *up to date*. Hal ini bertujuan supaya perencanaan program pendidikan bisa lebih tepat sasaran, lebih cepat dan efisien serta bisa mengatasi masalah pendidikan yang terjadi.

Stakeholder menurut *Merriam-Webster Dictionary* memiliki dua makna, makna yang pertama seseorang yang dipercaya sepenuhnya. Makna yang kedua orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh suatu tindakan. Menurut Hatry stakeholder adalah salah satu kategori masyarakat sekolah, yang merupakan unsur-unsur sekolah yang jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka proses persekolahan tersebut menjadi terganggu. Definisi ini lebih diperjelas dalam kamus Manajemen Mutu, stakeholder adalah kelompok atau individu di dalam atau luar organisasi yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi oleh pencapaian misi, tujuan dan strategi organisasi biasanya terdiri atas pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemerintah dan peraturannya.

Dalam konteks sekolah, stakeholder adalah masyarakat sekolah yang merupakan warga atau individu yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran social dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. Stakeholder adalah segenap komponen terkait yang memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap program pendidikan. Secara umum istilah stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan.

Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang menjelaskan bahwa mengenai stakeholder, yaitu:

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkatan satuan pendidikan.

Menurut Schemeer menyatakan "*Stakeholder in a process are actors, group or organization with vested interest in the policy being promoted.*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Stakeholder ini bisa berupa perorangan, komunitas atau organisasi yang memiliki peran dalam setiap tingkat golongan masyarakat.

Sukirman (2009) menyatakan bahwa: "*Stakeholder* sekolah dibagi menjadi dua yaitu penyelenggara sekolah (Kepala sekolah, guru, dan karyawan) sebagai elemen dari internal *stakeholder* dan eksternal *stakeholder* yang terdiri dari komite sekolah (para orang tua dan pakar pendidikan), kreditor, supplier, pemerintah dan masyarakat

Dari beberapa defenisi mengenai stakeholder peneliti memberikan pengertian stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Dengan Perkataan lain stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah.

a. Peran Stakeholder Pendidikan

1) Peran Guru

- a) Menyampaikan materi pembelajaran,
- b) Menyiapkan metode pembelajaran,
- c) Menyiapkan kurikulum belajar harian,
- d) Membuat rencana pembelajaran harian, bulanan dan tahunan.

2) Peran Orang Tua

- a) Mendukung pendidikan murid di sekolah
- b) Membiayai pendidikan anak murid
- c) Memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak murid

3) Peran Pemerintah sebagai stakeholder pendidikan adalah:

- a) Menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai
- b) Membuat kurikulum yang baik dan menyesuaikan dengan kondisi geografis
- c) Memberikan program pendidikan yang sustainable atau berkelanjutan, tidak hanya tambal sulam atau terputus-putus.
- d) Mendukung semua upaya peningkatan mutu pendidikan oleh organisasi atau individu.
- e) Mengadakan program peningkatan mutu tenaga pendidik dan guru
- f) Mendukung siswa berprestasi dengan beasiswa dan bantuan pendidikan
- g) Memberikan bantuan operasional sekolah

- h) Meningkatkan kesejahteraan guru
- i) Pemerataan tenaga pendidik ke setiap daerah yang kekurangan guru

#### 4) Peran Karyawan Sekolah

Staf dan karyawan sekolah diharapkan bisa bekerjasama untuk saling diskusi tentang aturan pendidikan di sekolah dan menyebarkan informasi tentang pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan dan mengatasi masalah yang terjadi.

#### 5) Peran Tenaga Ahli Pendidikan (Profesional)

Tenaga ahli profesional pendidikan bisa memberikan saran dan nasihat yang baru tentang pendidikan. Orang-orang itu umumnya menguasai berbagai teori dan solusi atas masalah pendidikan yang dihadapi oleh guru, orang tua dan murid. Kita sendiri bisa dengan mudah menemukan lembaga kursus di daerah kita yang didirikan oleh tenaga ahli pendidikan. Itu juga bisa membantu siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih dalam tentang suatu pelajaran

## 2. Kebijakan Sistem Zonasi Sebagai Kebijakan Pendidikan

### a. Kebijakan pendidikan

Kebijakan pendidikan ini juga merupakan kebijakan publik. Dimana pengambilan keputusan diambil pemerintah. Kebijakan pendidikan ini melibatkan pemerintah dan masyarakat. Pendidikan yang dianggap sebagai suatu hal strategis sebagai penentu kualitas

Sebuah bangsa terletak pada tingkat pendidikan yang dicapai. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa lepas tangan dari pendidikan. kebijakan publik dibidang pendidikan ini dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah dan aktor yang ada di luar pemerintah yang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk diambil keputusan yaitu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan suatu kebijakan itu.

Kebijakan publik di bidang pendidikan ini meliputi kurikulum, sumber daya, sarana prasaran, serta hal lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. Menurut Anderson (dalam Rohman, 2010) menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) diartikan sebagai suatu arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan. Kebijakan publik meliputi beberapa kebijakan, di antaranya adalah kebijakan pendidikan.

Tilaar dan Nugroho menyatakan bahwa:

”Kebijakan pendidikan (*education policy*) adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan ini merupakan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi. Selain itu kebijakan merupakan sebuah langkah yang strategis berdasarkan beberapa pertimbangan demi tercapainya suatu tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat. Sehingga kebijakan yang diambil hendaknya bersifat tidak berpihak pada kalangan tertentu.

Sedangkan konsep dasar kebijakan pendidikan itu sendiri sebagaimana menurut Duke (dalam Raharjo, 2010) yaitu:

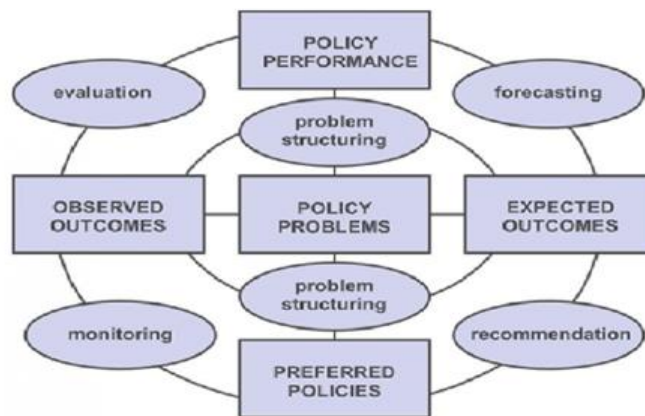
“Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 1) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, 2) Kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, 3) Kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, 4) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, 5) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif, 6) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan 8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem”.

Dari pernyataan di atas peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa pembuatan kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya. Kebijakan juga sebagai panduan tindakan diskresional dan tindakan diskresional. Kebijakan yang diambil merupakan strategi dalam memecahkan masalah. Selain itu kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.

Dalam proses pembuatan kebijakan ini pada akhirnya juga akan memerlukan analisis dalam perbaikannya. Analisis ini sebagai alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kebijakan. Analisis kebijakan dalam rangka proses pembuatan kebijakan, berarti meneliti bagaimana sebab, akibat, dan kinerja kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan akan memunculkan pertanyaan



apakah kebijakan tersebut dapat menjawab masalah. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan membuahkan sebuah informasi tentang masalah kebijakan. Untuk menjawab suatu permasalahan juga diperlukan sebuah analisis kebijakan. William Dunn dalam bukunya menggambarkan analisis sebuah kebijakan yang berorientasi masalah sebagai berikut:



Gambar 1. Analisis Kebijakan William Dunn yang berorientasi Masalah

Kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan dalam pembuatannya melalui tahapan yang panjang. Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Lima tahap ini haruslah memperhatikan tiga hal pokok yaitu pemerintah, aktor-aktor diluar pemerintah yakni kelompok kepentingan dan kelompok penekan, serta faktor-faktor selain manusia yang akan maupun telah mempengaruhi kebijakan.

#### b. Kebijakan Sistem Zonasi

Permendikbud No. 44 Tahun 2019 ditetapkan Mendikbud Nadiem Makarim pada 10 Desember 2019 mengenai tata cara Penerimaan Peserta Didik bari (PPDB), Berikut isi dari Permendikbud No. 44 Tahun 2019:

##### 1. Syarat Khusus

Calon peserta berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD.

##### 2. Syarat Umum

Untuk syarat usia harus dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain sesuai dengan domisili calon peserta didik. Bagi warga Negara Indonesia (WNI) atau warga Negara asing (WNA) serta berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi

persyarat, juga wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jendral yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Peserta didik WNA wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Khusus calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah juga dikecualikan dari syarat usia serta ijazah atau dokumen lain.

### 3. Jalur Zonasi

Diperuntukan bagi peserta didik berdomisi di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Kuota ini termasuk bagi anak penyandang disabilitas. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

### 4. Jalur Afirmasi

Jalur ini diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat/daerah (Kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya). Merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar wilayah zonasi sekolah bersangkutan. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat/daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua /wali. Isinya menyatakan bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan. Jika terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat/daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindak lanjuti hasil verifikasi.

### 5. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Kuota jalur ini dapat digunakan untuk anak guru.

### 6. Jalur Prestasi

Ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN, dan atau Hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan atau tingkat kabupaten/kota. Bukti atas prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan itu terbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

## 3. Konsep Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif

### Stakeholder SMP Negeri 6 Metro

Implementasi adalah suatu aktifitas yang disusun serta dilakukan dengan seksama juga mengacu pada standar tertentu agar dapat mencapai tujuan kegiatan. dengan kata lain implementasi itu adalah penyedia sarana untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu tujuan. Nurdin usman (2007: 70) mendefinisikan implementasi "Kegiatan yang bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi

bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”, Sedangkan Menurut M.Joko Susilo (2007:174) :

“Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi adalah penerapan-penerapan suatu kebijakan baru yang telah dirancang untuk memberikan suatu inovasi pada pelaksanaan praktisnya. Dengan tujuan memberikan dampak yang positif untuk pengembangan person”

Berdasarkan dari defenisi di atas, maka implementasi adalah kegiatan yang telah dirancang sebelumnya, dengan cara mengoptimalkan komponen-komponen yang ada untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Ditambahkan oleh Guntur Setiawan (2004 : 39):

“Implementasi adalah sebuah pengembangan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan kemudian dalam mencapainya dibutuhkan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Implementasi adalah suatu proses perubahan perilaku dalam petunjuk anjuran oleh inovasi terjadi dalam tahapan, setiap waktu dan mengatasi halangan dalam perkembangannya”.

Implementasi adalah sebuah proses, sehingga memerlukan manajemen semua komponen-komponen yang ada supaya bisa mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Arikunto (1993: 31) mengatakan “Manajemen atau Administrasi merujuk kepada pengertian pengaturan atau pengolahan”

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau pelaksanaan rancangan yang telah dibuat secara cermat dan rinci. Dalam implementasi memerlukan kerja sama dan mengoptimalkan semua komponen yang ada untuk melaksanakan sesuatu kegiatan, supaya dalam pelaksanaannya mendapatkan hasil seperti yang telah ditetapkan.

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran besar dalam pengembangan kemampuan akademik non akademik dan bahkan moral para siswa yang berada di dalamnya. Sekolahpun menjadi salah satu ujung tombak bagi perkembangan dan kelangsungan sebuah negara. Karena itulah keberadaan sebuah sekolah yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik dalam berbagai aspek mutlak diperlukan bagi segenap anak Indonesia. Ditambah lagi jika menilik tujuan pendidikan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, bahwa inilah salah satu alasan betapa pendidikan yang berkualitas memang berhak diterima oleh setiap tingkatan pendidikan anak Indonesia. Meskipun demikian, pencapaian kualitas yang diharapkan ini tidak semua sekolah maupun lembaga pendidikan mampu meraihnya. Bahkan secara umum, sistem pendidikan Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh dan kontinyu untuk mencapai kebaikan dalam tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan juga dituntut dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dan juga kooperatif di dunia global. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan lulusan yang unggul dalam baik sisi akademis, humanis, hingga moral. Agar lulusan pendidikan nasional memiliki kompetitif tidak bisa terlepas dari kualitas manajemen pendidikan, baik dalam hal efektivitas dan efisiensi proses ke arah peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah dalam mengatasi permasalahan mutu pendidikan telah banyak berbuat melalui program-program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Tantangan dalam dunia pendidikan khususnya bagi para pelaksana perencanaan dan manajemen, pengambil kebijakan urusan pendidikan dalam hal ini pemerintah, harus memiliki alat atau piranti untuk mengevaluasi sampai sejauh mana pembangunan pendidikan terutama kinerja layanan pendidikan bagi masyarakat dapat tercapai secara optimal. Salah satu strategi manajerial yang dikembangkan untuk menjamin sebuah organisasi (sekolah) memiliki daya tahan dan daya hidup dari masa sekarang dan berkelanjutan sampai masa yang akan datang yaitu dengan melakukan *analisis SWOT*.

Dalam penerapan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah, di dalamnya terdapat analisis SWOT.

a. Konsep Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata analisis dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah atau permasalahan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya dan dapat juga diartikan sebagai pengkajian terhadap suatu peristiwa (tindakan, hasil pemikiran dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Adapun kata SWOT

merupakan kependekan dari *Strenghts* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Treaths* (Tantangan). Untuk kekuatan dan kelemahan yakni berasal dari lingkungan internal sedangkan peluang dan hambatan berasal dari lingkungan eksternal.

Analisis SWOT (*SWOT analysis*) yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan (Nizak,2013).

Menurut Burhanuddin, (2005), model analisa SWOT bisa dianggap sebagai sebuah metode analisa yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda.

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis SWOT tidak serta merta digunakan hanya dalam Perusahaan. Artinya bahwa analisis ini dapat diterapkan di lembaga-lembaga lainnya seperti Pendidikan, LSM, atau lembaga usaha lainnya.

Analisis SWOT merupakan suatu metode analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Dari hal tersebut maka dapat dipahami bahwa analisis SWOT adalah suatu strategi untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan dengan melihat kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal dan peluang serta hambatan dari lingkungan eksternal.

Adapun penjelasan mengenai keempat faktor adalah sebagai berikut:

#### 1) Faktor Kekuatan (*Strenghts*)

*Strenghts* (kekuatan) merupakan kondisi internal positif yang memberikan keuntungan kompetitif dalam menghadapi persaingan bagi lembaga pendidikan. *Strenghts* ini juga merupakan keunggulan lembaga baik dari segi sumber daya yang dimiliki maupun upaya yang telah dilakukan yang lebih baik dari pesaing. Kekuatan ini yang kemudian mmenjadi kunci perbedaan lembaga pendidikan satu dengan lembaga pendidikan yang lainnya (*competitor*).

Dari hal tersebut dapat dipahami faktor-faktor kekuatan dalam suatu lembaga pendidikan adalah kompetensi khusus atau keunggulan lembaga pendidikan tersebut sehingga menimbulkan nilai plus pada pandangan masyarakat.

Hal ini bisa dilihat jika suatu lembaga pendidikan mempunyai keunggulan

yang membuat masyarakat memilih lembaga pendidikan tersebut bagi anak-anaknya, ketrampilan *skill* yang dimiliki peserta didik dan selain itu *output* atau hasil dari lulusan lembaga pendidikan tersebut menjadi andalan dan dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih baik serta kelebihan-kelebihan lain sehingga membuatnya lebih unggul dari lembaga pendidikan lainnya

## 2) Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)

*Weakness* (kelemahan) merupakan kondisi internal negative yang dapat merendahkan penilaian terhadap sekolah/madrasah. Kelemahan dapat berupa rendahnya SDM yang dimiliki, produk yang tidak berkualitas, *image* yang tidak kuat, kepemimpinan yang buruk, dan lain- lain.. Dengan kata lain kelemahan adalah kekurangan yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan tersebut harus tahu bagaimana menentukan kebijakan untuk meminimalisir kelemahan agar menjadi kelebihan dan tidak menjadi penghalang untuk kedepannya.

## 3) Peluang (*Opportunities*)

Suatu peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan utama adalah salah satu dari peluang identifikasi dari segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan-perubahan dalam keadaan bersaing, atau peraturan, perubahan teknologi, dan hubungan pembeli dan pemasok yang diperbaiki dapat menunjukkan peluang bagi perusahaan. *Opportunity* (peluang) adalah kondisi sekarang atau masa depan yang menguntungkan sekolah/madrasah. Peluang merupakan kondisi eksternal yang dapat memberikan peluang-peluang untuk kemajuan lembaga.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa peluang merupakan suatu kondisi yang menguntungkan bagi lembaga pendidikan tersebut yakni seperti:

- a) Kecenderungan penting dikalangan peserta didik
- b) Identifikasi layanan pendidikan yang belum mendapat perhatian.
- c) Hubungan dengan masyarakat.
- d) Lingkungan yang memadai dan mendukung.
- e) Kebutuhan masyarakat sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa peluang merupakan suatu kondisi yang menguntungkan bagi lembaga pendidikan tersebut yakni seperti:

- a) Kenderungan penting dikalangan peserta didik

- b) Identifikasi layanan pendidikan yang belum mendapat perhatian.
- c) Hubungan dengan masyarakat
- d) Lingkungan yang memadai dan mendukung.
- e) Kebutuhan masyarakat sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan

Contoh peluang untuk lembaga pendidikan pada saat ini adalah, modernisasi membuat perubahan paradigma pandangan masyarakat, perubahan akibat modernisasi masuk dalam segala aspek kehidupan maka terdapat era krisis moral dan pergaulan sehingga diperlukan perisai berupa spiritual yang kuat agar tetap dalam berjalan sesuai dengan aturan dan tidak terjerumus dengan perkembangan zaman, maka dari itu lembaga pendidikan menyediakan pendidikan yang berbasis dengan penguatan spiritual, mental dan akhlak namun tidak meninggalkan perkembangan ilmu pengetahuan

4) *Treaths* (tantangan) adalah kondisi eksternal sekolah/madrasah, sekarang dan yang akan datang yang tidak menguntungkan, dan secara serius dapat mempengaruhi masa depan lembaga pendidikan. Tantangan ini dapat berupa munculnya pesaing-pesaing baru, penurunannya jumlah siswa, dan lain-lain. Tantangan berupa keadaan lingkungan eksternal yang mengancam keberhasilan dan keberlangsungan lembaga pendidikan itu sendiri. Ancaman merupakan kebalikan dari peluang, maka dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi organisasi. Jika tidak diatasi maka ancaman dapat menjadi penghalang bagi suatu organisasi baik untuk sekarang atau di masa depan. Dari hal tersebut dipahami bahwa ancaman berupa keadaan lingkungan eksternal yang mengancam keberhasilan dan keberlangsungan lembaga pendidikan itu sendiri. Contoh dari ancaman bagi lembaga pendidikan antara lain: kurangnya minat peserta didik baru, kurangnya kepercayaan masyarakat, adanya lembaga pendidikan serupa yang lebih bermutu.

#### b. Pendekatan Analisis SWOT

Di dalam analisis SWOT terdapat dua pendekatan agar lebih mudah dalam melaksanakan analisis SWOT, yakni sebagai berikut :

##### 1) Analisis SWOT dengan Pendekatan Kualitatif

Pendekatan secara kualitatif artinya melakukan analisis secara mendalam faktor-faktor internal dan eksternal lembaga dengan menggunakan

berbagai metode kualitatif. Data yang digunakan dalam melakukan SWOT kualitatif adalah data yang dideskripsikan berupa kata-kata dan bukan berupa angka, metode yang digunakan seperti wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi.

## 2) Analisis SWOT dengan Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan secara kuantitatif artinya melakukan analisis mengenai faktor-faktor internal dan eksternal lembaga dengan menggunakan berbagai metode kuantitatif. Data yang digunakan berupa angka-angka statistik, teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket. Oleh karena, itu penyusunan angket melalui kisi-kisi instrumen untuk menggali data sangat menentukan keabsahan data yang digunakan.

## 3) Langkah-langkah Analisis SWOT

Berikut adalah langkah-langkah analisis SWOT baik dari pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

- a) Langkah-langkah analisis SWOT dengan pendekatan Kualitatif :
  - 1) Pertama dengan pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan menghadirkan semua stakeholder lembaga. Dapat dilakukan dengan wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi.
  - 2) Kedua dengan melakukan analisis SWOT dengan bantuan matriks SWOT untuk menentukan strategi sebagai pedoman dan kerangka program pengembangan lembaga pendidikan yang harus dilakukan. Dengan menggunakan strategi berikut: strategi SO (*strenght-opportunity strategy*), strategi WO (*weakness-opportunity strategy*), strategi ST (*strenght-threaths strategy*), dan strategi WT (*weakness-threaths strategy*).
- b) Langkah-langkah analisis SWOT dengan pendekatan Kuantitatif :
  - 1) Pertama pembobotan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga pendidikan.
  - 2) Kedua mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
  - 3) Ketiga menentukan nilai *rating* masing-masing faktor.
  - 4) Keempat menghitung nilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari setiap faktor.
  - 5) Kelima rekapitulasi perhitungan dan selanjutnya dimasukkan dalam matriks



kuadran. Keenam menilai posisi organisasi. Ketujuh menentukan strategi untuk tumbuh.

Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisa yang bersifat situasional yang digunakan dalam rangka mendalami kondisi internal maupun eksternal sebuah lembaga, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Dengan mengetahui lebih dalam tentang kedua kondisi tersebut, diharapkan lembaga pendidikan tersebut akan mampu mengintrospeksi diri atas data-data yang telah didapatkan dalam penelitian SWOT. Analisis SWOT yang dilakukan ini dapat menjadi cerminan atau refleksi dari lembaga pendidikan itu sendiri sehingga dapat mengetahui sisi baik maupun sisi buruk yang dimilikinya dan dapat menemukan cara untuk memperbaiki diri dari mengetahui hal-hal tersebut. Analisis SWOT dapat pula menjadi peta, karena setelah masing-masing faktor ditemukan, kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk perbaikan di kemudian hari telah pula ditentukan, sehingga yang harus dilakukan lembaga pendidikan tinggal melaksanakannya dengan penuh komitmen, disiplin, dan tanggung jawab demi terwujudnya lembaga pendidikan yang berkualitas, berintegritas, dan menghasilkan siswa-siswa yang kelak menjadi sumber daya manusia yang tak hanya unggul dalam segi akademik, tapi juga moral, agama, dan sosial.

## **E. Kerangka Pikir Dan Paradigma Teori**

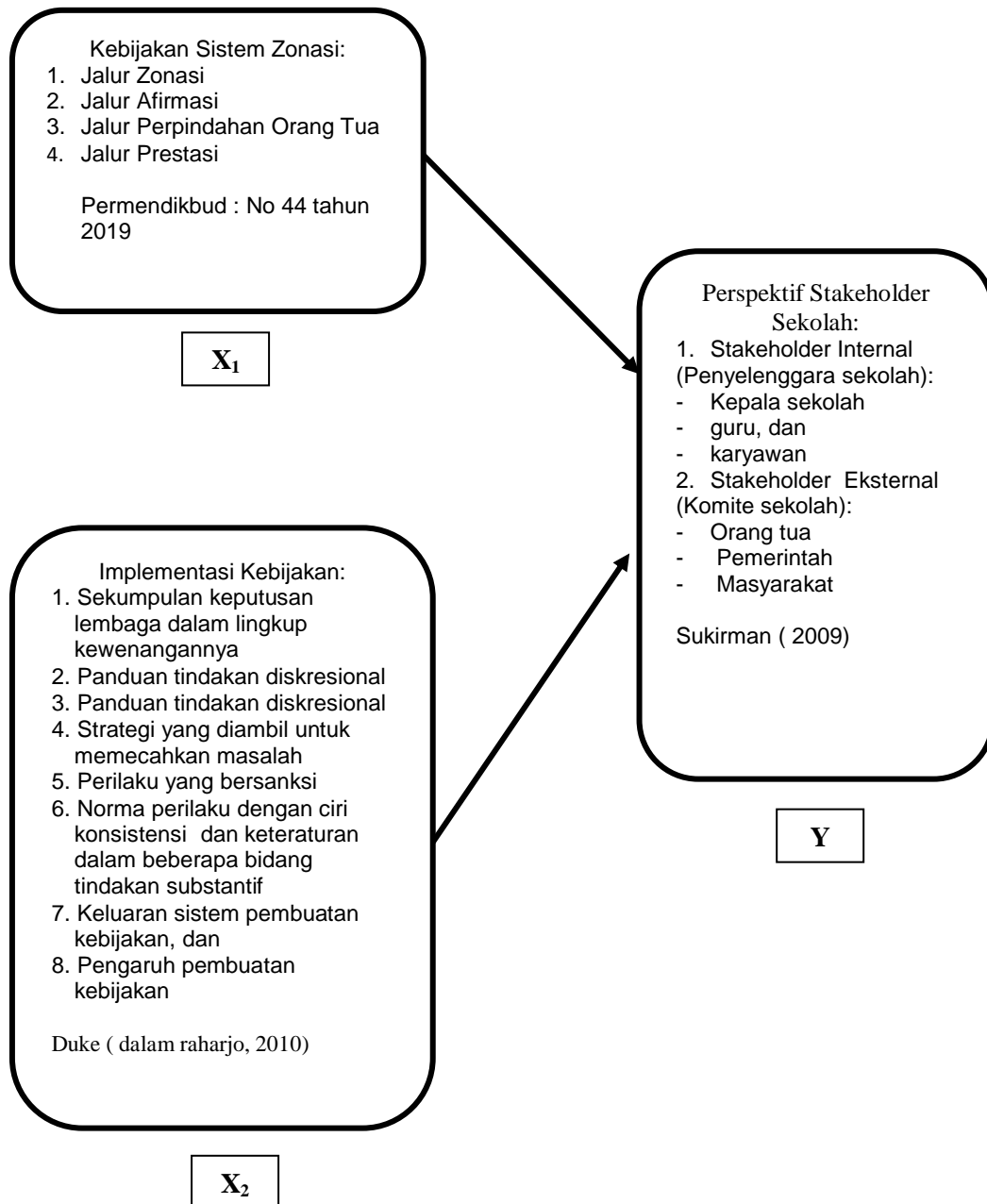
### **a. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir didasarkan kepada implementasi sistem zonasi perspektif stakeholder sekolah. Untuk itu perlu diketahui bagaimana pelaksanaan sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah pada setiap sekolah yang ada di Kota Metro sehingga sistem zonasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Peran masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan sistem zonasi agar pemerataan peserta didik ada setiap sekolah dapat tercapai.

Pandangan stakeholder terhadap sistem zonasi juga sangat penting karena berkaitan dalam proses pembelajaran. Dengan diterapkannya sistem zonasi diharapkan sekolah mampu mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki. Sehingga mutu sekolah dapat ditingkatkan dan peserta dapat mengembangkan kemampuan dengan bimbingan guru.

## b. Paradigma Teori

Dalam bentuk paradigma penelitian, kerangka berfikir di atas digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar. 2 Paradigma.

## F. Hasil Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah yaitu sebagai berikut:

- a. Elsa Nida Pangaribuan dan Nunuk Hariyati, dengan judul :*“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik”* menggunakan metode kualitatif dan rancangan studi kasus. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi berjalan dengan lancar namun tetap memiliki kendala, yaitu pemahaman orang tua terhadap sosialisasi PPDB sistem zonasi. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulisa adalah penelitian yang dilakukan oleh Elsa Nida Pangaribuan dan Nunuk Hariyati menggunakan Permendikbud Nomo 14 Tahun 2018 sedangkan penulis menggunakan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.
- b. Hermin Aprilia Lestari, dengan judul *“Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017”* menggunakan metode deksriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun telah berjalan baik. Baik *offline* maupun *online*. Namun, terdapat permasalahan terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Hermin Aprilia Lestari berfokus pada penerimaan peserta didik baru, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada jalur penerimaan zonasi.
- c. Selanjutnya, Aullia Rahmawati dan Mufflihatin dengan judul : *“Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kediri”* menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pada Tahun Ajaran 2017/2018 kebijakan PPDB zonasi masih hanya untuk SMA dan SMK, sedangkan pada SMP belum ada pemberlakuan. Tetapi untuk tahun ajaran 2018/2019 kebijakan PPDB zonasi masih menjadi wacana yang akan dirumuskan melalui musyawarah dengan pihak terkait. Yang

membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Aullia Rahmawati dan Muflihatin memfokuskan pada komunikasi yang dijalankan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana implementasi penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi dijalankan, serta kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam pelaksanaannya.

- d. Munawar Sholeh, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Nasional Tentang Pnuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun periode 2003-2006 di Wilayah DKI Jakarta”. Ditemukan bahwa 1) pemerintah sangat berkomitmen menerapkan wajib belajar 9 tahun, 2) implementasi kebijakan adalah realisasi dari komitmen pemerintah pada penerapan pendidikan wajib 9 tahun, 3) pemerintah DKI Jakarta telah dengan baik mengimplementasikan kebijakan nasional pendidikan wajib 9 Tahun, tapi masih berhasil kurang dari 95 % dari angka partisipasi kasar di level Sekolah Dasar dan kurang dari 80% dari tingkat partisipasi bersih di Sekolah Dasar dan level sekolah menengah pertama, 4) Tingkat partisipasi publik di level Sekolah dasar rendah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis terdahulu fokus pada penerapan pendidikan wajib belajar 9 tahun sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan sistem zonasi perspektif stakeholder sekolah.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik menunjukkan adanya kendala pada system zonasi yang di hadapi oleh pihak sekolah. Hal ini yang menjadi ajuan peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan system zonasi perspektif stakeholder sekolah.

### **G. Hipotesis.**

Dari kerangka berfikir di atas peneliti membuat kesimpulan bahwa hipotesis sesuatu hal yang sifatnya masih sementara dan belum terbukti hasilnya secara empiri, atau jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan. Sehingga perlu di adakan penelitian untuk membuktikan kebenarannya. Maka peneliti menarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

1. Implementasi sistem zonasi berpengaruh terhadap pemerataan peserta didik

SMP Negeri 6 Metro di Kota Metro.

2. Pandangan stakeholder terhadap implementasi sistem zonasi di SMP Negeri 6 Metro di Kota Metro.
3. Hasil implementasi sistem zonasi berpengaruh terhadap stakeholder sekolah di SMP Negeri 6 Metro di Kota Metro.